

Kebijakan Moneter dan Implikasinya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Ahmad Mansur

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya
email: amansur.iain@gmail.com

Abstract

The role of government is very important in an Islamic economy. The government is not only responsible for the establishment of Islamic values and norms in the society, but also in economic matters such as fulfillment of basic needs, achieving full employment, price stability and low inflation, growth and development that lead to economic well being and welfare. To achieve that goal, the government certainly needs an appropriate policy to direct the economy into desired goal and direction. One of the policies is monetary policy. Monetary policy refers to the control of the supply of money to achieve and accomplish manageable inflation, price stability, full employment and steady growth in the economy. This research tries to investigate the role of monetary policy and its implication on economic development in an Islamic perspective conceptually and theoretically. It found that the role of monetary policy is the same as that in modern economy, except that in Islamic economy, the role of government is to ensure the Islamic values and norms to prevail in the society including the establishment of free interest economy and Islamic financial system that is free from interest based. The instruments of monetary policy in an Islamic perspective are not only confined in using open market operation, reserve ratio, discount rate, but also beyond those tools such as credit rationing, lending ratio and profit ratio which are based on the Islamic principles of interest free based economy.

Peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam sangat penting. Pemerintah bukan saja bertanggung jawab terhadap tegaknya norma Islam di masyarakat, tetapi juga dalam hal hal ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan dasar baik

* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 177 Surabaya. Telp. 031-8417418, 8418457.

sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, penyerapan tenaga kerja secara penuh, menjaga stabilitas harga dan inflasi rendah serta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah tentu harus mempunyai kebijakan yang tepat agar dapat membawa perekonomian nasional pada tujuan dan target yang dikehendaki. Dan salah satu kebijakan itu adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian peredaran uang di dalam ekonomi untuk menjaga tercapainya stabilitas harga, inflasi yang terkendali, penyerapan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkelanjutan. Penelitian ini berusaha melakukan kajian mendalam mengenai peran kebijakan moneter dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi di dalam perspektif ekonomi Islam secara teoritis dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada perbedaan dalam peran kebijakan moneter baik dalam perspektif Islam maupun dalam perspektif ekonomi modern, kecuali bahwa di dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah harus menjamin tegaknya nilai nilai dan norma Islam di masyarakat termasuk menciptakan sistem ekonomi dan sistem perbankan bebas bunga. Adapun instrumen kebijakan moneter di dalam perspektif ekonomi Islam tidak terbatas kepada operasi pasar terbuka, rasio cadangan wajib dan fasilitas diskonto yang bebas bunga, melainkan lebih dari itu pendistribusian kredit secara adil, rasio pinjaman dan rasio bagi hasil yang semua transaksi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan bebas dari praktik riba.

Keywords: *Monetary policy, instrument of monetary policy, economic development, Islamic perspective, manageable inflation.*

Pendahuluan

Sistem perekonomian *laissez faire* atau sistem perekonomian pasar bebas yang menyerahkan seluruh kegiatan ekonominya kepada mekanisme pasar, dari mulai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi hampir sudah ditinggalkan oleh Negara-Negara di dunia, bahkan di Negara yang mempunyai sistem ekonomi liberal dan kapitalis sekalipun. Campur tangan pemerintah di dalam sistem perekonomian pasar bebas ini tak dapat dilepaskan dari tidak dapat berjalannya mekanisme pasar dengan baik dan sempurna sehingga terjadi apa yang dinamakan kegagalan pasar atau *market*

failure. Hal ini tentu mengundang pemerintah untuk melakukan campur tangan di dalam ekonomi untuk menempatkan ekonomi ke arah yang tepat dan dikehendaki. Meskipun di dalam sistem perkonomian pasar bebas ini, setiap orang bebas membeli barang yang diinginkannya dan memilikinya, setiap orang bebas menjual barang dan jasa apa saja yang dimilikinya selama hal itu ada permintaan, sebab tanpa ada permintaan tentu tidak akan pernah barang tersebut diproduksi, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya di dalam ekonomi untuk memperoleh laba sebanyak banyaknya dan setiap orang harus berperilaku rasional di dalam semua aktivitas ekonomi, sementara pemerintah hanya sebagai fasilitator yang baik dan tidak boleh melakukan intervensi ataupun campur tangan di dalam pasar persaingan yang dilakukan secara bebas. Namun kenyataan yang terjadi adalah bahwa seringkali pemerintah selalu melakukan intervensi ketika melihat kegagalan pasar.

Di dalam perspektif ekonomi Islam, peran pemerintah sangat penting dan diperlukan, terutama yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pencapaian ekonomi yang sejatera dan peningkatan standar kehidupan. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat yang bermodal, tapi harus juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberlakukan norma-norma dan nilai-nilai Islam di semua aspek kehidupan manusia termasuk yang berkaitan dengan ekonomi dengan membuat usaha-usaha yang positif dan kebijakan-kebijakan yang teliti. Di dalam bidang ekonomi, pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar hidup seluruh warganya, membuka lapangan kerja, memudahkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi, memastikan terlaksananya norma-norma dan nilai-nilai Islam dalam menetapkan harga dan pelaksanaan *transfer payments* yang membawa kepada distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Karena itu, pemerintah dalam ekonomi Islam harus memerankan peran yang positif dan signifikan dalam pembangunan ekonomi.

Semua hal yang tersebut di atas tentu memerlukan suatu kebijakan ekonomi yang tepat dari sisi pemerintah. Ada dua kebijakan yang utama dalam ekonomi yang disebut kebijakan fiskal dan

moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijaksanaan yang dilakukan untuk mengontrol penawaran dan permintaan uang (uang yang beredar di masyarakat), persediaan uang yang ada, stabilitas nilai mata uang dan arah kemana uang akan dialokasikan dengan menggunakan alat-alat atau piranti moneter yang tepat supaya dapat dicapai tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri. Adapun kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dipakai untuk menggerakkan langkah-langkah untuk memperoleh pendapatan Negara termasuk pendapatan dari pajak serta melakukan kontrol terhadap arah kebijakan fiskal dan kontrol terhadap besaran jumlah pengeluaran dan belanja pemerintah dengan menggunakan alat-alat fiskal, supaya dapat dicapai tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri di dalam ekonomi. Di dalam penelitian ini, penulis hanya focus untuk membahas kebijakan moneter dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi di dalam perspektif Islam.

Tujuan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Sebelum melangkah kepada tujuan kebijakan moneter, ada baiknya kita mengetahui secara garis besar tentang tujuan kebijakan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. *Pertama*, tujuan kebijakan ekonomi yang paling mendasar dan fundamental adalah untuk menegakkan Islam di setiap aspek kehidupan masyarakat di dalam Negara dan menyebarkan syi'ar Islam di dunia serta mempertahankan Negara dan rakyat dari serangan musuh. *Kedua*, membantu tercapainya tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berperan penting dalam tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat serta mewujudkan kewajiban Negara yang diantaranya yaitu:

Pertama, menjamin kesejahteraan ekonomi kepada rakyat baik berupa penyediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi setiap individu yang berupa sandana, pangan dan papan serta pendidikan dan kesehatan.

Kedua, melaksanakan disiplin dan administrasi yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi Negara termasuk mengintensifkan peran lembaga *Hisbah* di dalam ekonomi.

Ketiga, sebagai akibat dari tujuan kebijakan ekonomi yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya ekonomi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Keempat, menciptakan suasana ekonomi yang kondusif, terutama iklim investasi dan kegiatan produksi yang berorientasi ekspor dan kesempatan-kesempatan yang menguntungkan bagi kegiatan-kegiatan ekonomi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain keempat kebijakan ekonomi yang tersebut di atas, masih ada dua lagi kebijakan yang utama dan permanen di dalam menyelenggarakan ekonomi Negara. Realisasinya mungkin memerlukan langkah-langkah yang berbeda dari segi tingkat kepentingan ekonomi, ruang lingkup dan waktu pelaksanaannya. Kedua kebijakan ekonomi tersebut adalah kebijakan fiskal dan moneter, dengan kedua kebijakan ini, Negara dapat mewarnai wajah ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja, pengendalian inflasi dan beberapa target ekonomi tertentu, di mana ada beberapa target tertentu yang lebih penting dan relevan untuk dikedepankan dari yang lainnya.

Lebih lanjut kedua kebijakan fiskal dan moneter ini dapat digunakan untuk saling melengkapi dalam mencapai target tertentu dalam ekonomi. Kebijakan fiskal mungkin lebih efektif untuk menangani permasalahan tertentu dan mencari solusinya, begitu juga sebaliknya, namun keduanya mungkin juga dapat digunakan untuk saling melengkapi demi tercapainya target ekonomi tertentu.¹ Hanya saja fokus di dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan moneter dan implikasinya di dalam pembangunan ekonomi di dalam perspektif ekonomi Islam.

Definisi dan pengertian dari kebijakan Moneter² adalah tindakan pemerintah (otoritas moneter) untuk mempengaruhi situasi makro ekonomi melalui pasar uang atau dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Misalnya mempengaruhi jumlah uang beredar atau *money supply*.

- $M_s \rightarrow r \rightarrow I \rightarrow Z \rightarrow P:Q$
- r = bunga
- I = investasi
- Z = permintaan agregat
- $P:Q$ = Tingkat harga (P) & Pendapatan atau GDP riil

¹ Misalnya, kedua kebijakan fiskal dan moneter dapat digunakan untuk menangani inflasi.

² Boediono, Ekonomi Makro, Seri Sinopsis. (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 1999), 96

Dalam hal tersebut diatas, jumlah uang beredar akan mempengaruhi tingkat suku bunga, tingkat suku bunga akan mempengaruhi tingkat investas, tingkat investasi akan mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan tingkat permintaan agregat akan mempengaruhi tingkat harga dan pendapatan atau produk domestik bruto riil. Bila jumlah uang beredar mampu menurunkan tingkat suku bunga, maka turunnya tingkat suku bunga akan mendorong peningkatan investasi, peningkatan investasi tentu akan meningkatkan tingkat produksi dan oputput. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan pendapatan yang berarti ekonomi telah tumbuh.

Definisi lain dari kebijakan moneter adalah kebijakan yang menyangkut masalah masalah moneter yang berkaitan dengan (1), pengendalian lembaga keuangan; (2), penjualan dan pembelian secara aktif kertas kertas berharga oleh otoritas moneter untuk mempengaruhi perubahan jumlah peredaran uang; (3), penjualan dan pembelian secara pasif kertas kertas berharga untuk mempertahankan struktur suku bunga tertentu, stabiulitas harga saham, atau memenuhi kewajiban dan komitmen tertentu lainnya.³ Pengertian lain dari kebijakan moneter adalah bahwa kebijakan moneter merupakan alat pemerintah di dalam melakukan stabilisasi ekonomi makro yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, penyerapan tenaga kerja, perbaikan terhadap neraca pembayaran dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, tentunya pertumbuhan ekonomi yang berlanjutan atau *sustainable economic growth*.

Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mendorong ekonomi Negara untuk dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam melakukan produksi barang dan jasa.⁴ Negara yang lebih banyak membuat produksi barang dan jasa akan menjadi Negara yang lebih kaya dan berbahagia dari pada Negara yang tidak produktif. Negara yang produktif dan mempunyai barang dan jasa yang melimpah di dalam jangka panjang merupakan pondasi ekonomi yang lebih baik dan akan membuat warga Negara mampu menikmati kemakmuran ekonomi. *Real output* yang tinggi berarti menyerap tenaga kerja yang tinggi pula. Selain hal tersebut di atas,

³ ML. Jhingan, *The Economics of Development and planning*. Ter. D. Guritno (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), 370

⁴ Roger L. Miller dan David D. VanHoose, *Modern Money and Banking*. (Singapore: McGraw-Hill. Inc., 1985), 622

tujuan kebijakan moneter adalah menjaga tingkat inflasi yang rendah dan membuat harga yang stabil. Mencapai tingkat pengangguran yang rendah atau mencapai *full employment*, dan memperbaiki neraca pembayaran & neraca perdagangan dan *terms of trade*.

Kebijakan moneter, selain mendukung kebijakan ekonomi tersebut di atas, di dalam perspektif Islam, secara spesifik tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut:⁵

1. Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang konsisten dengan optimalisasi penggunaan sumber daya ekonomi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
2. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata di dalam ekonomi tanpa ada ketimpangan ekonomi yang tinggi.
3. Melakukan kontrol terhadap terjadinya siklus fluktuasi yang tinggi di dalam ekonomi yang dapat berpengaruh buruk terhadap aktivitas ekonomi dan menyebabkan pelaku ekonomi menderita karenanya.
4. Menegakkan nilai-nilai Islam dan memberlakukan norma-norma Islam dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap praktek-praktek yang dilarang *shari'ah*, seperti transaksi ekonomi yang berdasarkan bunga serta memberikan dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang dianggap perlu dengan memberikan prioritas yang tinggi dan begitu juga sebaliknya.
5. Menjaga keseimbangan di dalam neraca pembayaran eksternal.

Tujuan spesifik dari kebijakan moneter di atas memang tidak berbeda dari tujuan spesifik dari kebijakan fiskal. Memang kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua alat kebijakan pemerintah di dalam mengarahkan ekonomi suatu Negara, tentunya menuju kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tercapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tercapainya distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata dan terjaminnya kebutuhan dasar masyarakat.

⁵ Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam*. (Petaling Jaya: Pelanduk Publication, 1988), 78

Instrumen Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Ciri utama dari kebijakan moneter di dalam ekonomi Islam adalah dihapusnya sistem bunga dari sistem keuangan oleh otoritas moneter. Ketiadaan sistem bunga yang notabene merupakan instrument yang sangat penting di dalam kebijakan moneter menyebabkan otoritas moneter di dalam ekonomi Islam bergantung kepada instrument yang lain dalam menjalankan kebijakan moneternya. Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan instrumen alternatif yang dapat digunakan dalam menjalankan kebijakan moneter, seperti, rasio bagi hasil (*profit Ratio*), rasio pinjaman (*lending ratio*), rasio tabungan rekening giro (*demand deposit ratio*), rasio pembiayaan (*refinance ratio*), dan operasi pasar terbuka.⁶ Adapun instrumen-instrumen atau piranti utama kebijakan moneter adalah sebagai berikut:⁷

I. Regulasi Uang Primer (*Base Money*)

Suplai uang primer harus konsisten dengan pertumbuhan sektor riil di dalam ekonomi guna mendukung proses pertumbuhan ekonomi dan menghindarkan diri terjadinya inflasi tinggi yang disebabkan oleh kelebihan suplai uang serta menghindari terjadinya depresi ekonomi yang disebabkan oleh kekurangan suplai uang.

Bank Negara, selaku wakil pemerintah yang mempunyai wewenang dalam memformulasikan dan melaksanakan kebijakan moneternya, harus menentukan ukuran pertumbuhan yang optimum dari uang primer dan menentukan berapa bagian yang harus masuk ke kas Negara tanpa ada pembebanan biaya dan berapa bagian lainnya berada di tangan beberapa institusi keuangan, seperti bank komersial dan bank pembangunan berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

II. *Reserve Requirement* atau *Cash Ratio* atau Cadangan Wajib

Ini adalah ketentuan yang dibebankan oleh bank Negara kepada bank umum, bank komersial dan yang sejenisnya untuk

⁶ Meskipun terminology "operasi pasar terbuka" bukan barang baru, tetapi di dalam ekonomi Islam, hal itu merujuk kepada sesuatu yang berbeda, namun secara natural, serupa dalam operasinya

⁷ Untuk lebih detil mengenai alat-alat atau instrumen kebijaksanaan moneter di dalam ekonomi Islam, silahkan merujuk M.N. Siddiqui, "*Banking Without Interest*". (Leicester: The Islamic Foundation, 1983); M. Umer Chapra, "*Toward a Just Monetary System*". (Leicester: The Islamic Foundation, 1985); M. Uzair, "Central Banking Operations in Interest-Free Banking System", dalam Mohammad Ariff (ed). *Monetary and Fiscal Economics of Islam*". (Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics, 1982), 221-229.

menaruh bagian tertentu dari uang tunai sebagai cadangan wajib di bank Negara. Rasio cadangan wajib dapat dinaikkan dan diturunkan sesuai dengan arah kebijakan moneter yang ditentukan oleh bank Negara untuk mengendalikan jumlah uang beredar.

III. *Profit Ratio* atau Rasio Bagi Hasil

Rasio bagi hasil adalah yang digunakan untuk membagi hasil keuntungan antara pengusaha dan bank. Karena bunga dilarang di dalam ekonomi Islam, maka sebagai gantinya, pengusaha dan bank (sebagai kontributor/pemberi modal) akan mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila pengusaha memperoleh tingkat bagi hasil (keuntungan) yang tinggi, maka berarti bank akan mendapatkan tingkat bagi hasil yang rendah, dan skenario ini pasti akan meningkatkan lebih banyak investasi di dalam ekonomi, dan begitu juga sebaliknya. Bank Negara harus melakukan kontrol atas rasio bagi hasil ini untuk mengontrol perilaku bank dalam memberikan pinjaman.

IV. *Lending Ratio* atau Rasio Pinjaman

Ini berkaitan dengan prosentase dari simpanan uang pada rekening giro, di mana bank komersial diharuskan untuk memberikan pinjaman kepada beberapa kelompok tertentu tanpa meminta bagi hasil dan tanpa beban biaya (tanpa bunga) sebagai *al-Qord al-Hasan*. Uang ini adalah uang para nasabah yang di simpan di bank tersebut dan digunakan bank untuk kepentingan bank yaitu memperoleh keuntungan. Beberapa ahli ekonomi Islam menyarankan bahwa harus ada beberapa proporsi tertentu dari uang simpanan tersebut yang dipinjamkan kepada mereka yang miskin dan membutuhkan dalam bentuk *al-Qord al-Hasan* tanpa beban biaya apapun. Bila rasio pinjaman (tanpa beban biaya) tersebut ditetapkan tinggi, maka hal ini akan menurunkan penciptaan kredit yang diberikan kepada nasabah oleh bank komersial dan sejenisnya, begitu sebaliknya.

V. *Demand Deposit Ratio* atau Rasio Simpanan Rekening Giro

Ini adalah prosentase dari simpanan rekening giro bank komersial yang dialihkan dan disalurkan kepada pemerintah untuk digunakan membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial, di mana pembiayaan proyek-proyek tersebut tidak dimungkinkan dan tidak diharapkan dari bank komersial dan sejenisnya. Rasio yang bervariasi dalam hal ini, diharapkan dapat mempengaruhi siklus fluktuasi ekonomi dengan merubah dasar penciptaan kredit oleh

bank dan kemampuan belanja pemerintah.

VI. *Refinance Ratio* atau Rasio Pembiayaan Kembali

Piranti ini dapat digunakan sebagai dasar oleh bank Negara untuk memberikan pembiayaan kembali kepada bank komersial dengan menyediakan likuiditas (dana segar siap pakai) tanpa pembebanan biaya, di mana bank komersial dalam keadaan membutuhkan dana likuiditas tersebut sampai kepada batas ketentuan presentase maksimum dalam memberikan pinjaman Uang yang dipakai untuk memeberikan pembiayaan kembali ini termasuk jumlah uang yang dialihkan dan disalurkan oleh bank komersial kepada bank Negara sebagai persyaratan rasio simpanan rekening giro, (*demand deposit ratio*).

VII. Operasi Pasar Terbuka

Dihapusnya system bunga dalam penjualan surat-surat berharga di dalam ekonomi Islam, maka operasi pasar terbuka dapat dilakukan dengan cara pembelian dan penjualn surat-surat berharga atau saham-saham yang berdasarkan bagi hasil sesuaid dengan atau mengacu kepada tingkat *return* yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter dalam melakukan kebijakan moneternya.

VIII. *Credit Rationing* atau Pemberian Rangsum (Pendistribusian) Kredit

Bank Negara boleh melakukan control atas arah dan besaran pinjaman kredit dan penyertaan modal berdasarkan bagi hasil yang diberikan kepada sektor-sektor tertentu di dalam ekonomi, di mana bank Negara dalam hal ini berfungsi sebagai badan yang melakukan seleksi dan kontrol secara umum terhadap kucuran kredit.

IX. *Moral Suasion* atau Anjuran Moral

Instrumen dari kebijakan moneter yang satu ini yaitu anjuran moral yang sarat dengan norma-norma dan nilia-nilai Islam, diharapkan dapat memberi kesadaran yang lebih efektif kepada semua pelaku ekonomi dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan para pelaku ekonomi dalam ekonomi konvensional, dalam kaitannya dengan system perbankan. Pendekatan moral, nasehat, dan konsultasi dua arah dapat memainkan peran yang penting dalam menentukan kebijakan bank komersial dan yang sejenisnya yang berkaitan dengan besaran, kewajaran dan arah pinjaman kredit yang dikucurkan oleh bank-bank tersebut misalnya *Murabaha* atau pembiayaan ekuitas.

Implikasi Pembangunan Ekonomi Dari Kebijakan Moneter

Implikasi atau dampak pembangunan yang dihasilkan dari kebijakan moneter mungkin dapat dibagi ke dalam dua kategori yang luas.

1. Dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dan terjadi akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan tanpa tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
2. Dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dan terjadi akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi dengan menggunakan piranti-piranti kebijakan moneter.

Dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan moneter untuk kategori pertama adalah penghapusan bunga sebagai piranti atau alat kebijakan moneter dan sebagai harga dari modal. Suatu amanat yang merupakan perintah dari kebijakan ekonomi moneter dan keuangan di dalam ekonomi Islam adalah menghapus bunga di dalam sistem keuangan dengan melarang semua bentuk praktek perbankan yang beroperasi berdasarkan suku bunga, dan mentransformasikan semua sistem keuangan dan perbankan menjadi suatu sistem yang bebas bunga dan berdasarkan bagi hasil. Sistem keuangan dan perbankan berdasarkan bagi hasil akan menghasilkan dua hal yang signifikan dalam pembangunan ekonomi, yaitu (1), penggunaan sumber daya ekonomi yang dapat diinvestasikan sampai kepada tingkat pendayagunaan penuh dan (2), efisiensi di dalam alokasi sumber daya ekonomi.

Bunga dapat membatasi jumlah investasi, dan sebagai konsekwensinya, investasi tidak dapat dilaksanakan sampai pada tingkat pendayagunaan penuh atau *full potential*. Sebagai contoh, jika suku bunga yang berlaku terhadap dana pinjaman adalah $x\%$, maka kegiatan investasi yang menggunakan dana tersebut hanya dapat dilaksanakan sampai pada tingkat *Marginal Efficiency of Capital* (MEC = tingkat keuntungan yang diharapkan) adalah $x\%$.⁸ Dengan kata lain, investasi hanya dapat dilakukan bila *marginal efficiency of capital*

⁸Ahmad Mansur, *Potensi Tabungan, Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Dalam Jurnal Keislaman Program Pascasarjana "AKADEMIKA" IAIN Sunan Ampel Surabaya. Vol. 13, No. 1, September, 2003

lebih besar atau minimal sama dengan tingkat pengembalian pembayaran suku bunga. Bila tingkat suku bunga $x\%$ tidak berubah dan nilai *marginal efficiency of capital* lebih rendah dari $x\%$, maka meneruskan investasi lebih lanjut hanya akan menambah beban pembayaran bunga dan bukannya menambah keuntungan.⁹

Di sisi lain, di dalam sistem perbankan dan keuangan bebas bunga atau yang berdasarkan bagi hasil, investasi dapat dilakukan lebih jauh sampai nilai MEC adalah *zero*. Karena perolehan keuntungan akan dibagi diantara pengusaha dan bank berdasarkan rasio keuntungan yang telah ditetapkan, berapapun nilai MEC, maka kedua pihak baik pengusaha maupun bank akan mendapatkan bagi hasil yang positif sampai MEC mencapai titik nol atau MEC adalah *zero*. Hal ini dimungkinkan karena tidak ada biaya bunga atas pinjaman modal. Meskipun tingkat penghasilan yang diharapkan atau MEC semakin berkurang, ketika jumlah investasi naik, tetapi potensi investasi ini masih dapat terus dilakukan dengan memperoleh keuntungan yang positif sampai MEC mencapai titik nol. Perilaku ini secara implisit menyatakan bahwa kegiatan investasi di dalam ekonomi Islam adalah tinggi. Karena itu, jumlah investasi yang dilakukan terhadap proyek-proyek di dalam sistem perekonomian yang berdasarkan bagi hasil atau tanpa bunga lebih tinggi dari pada jumlah investasi yang ada pada sistem perekonomian yang berdasarkan bunga. Tingginya tingkat investasi tentu akan berdampak baik terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan output dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pembangunan ekonomi.¹⁰

Di samping tingkat investasi yang lebih tinggi yang terjadi di dalam sistem perekonomian yang berdasarkan bagi hasil (tanpa bunga), alokasi sumber daya dan orientasi pertumbuhan ekonomi juga lebih efisien. Sebagai contoh, bank atau lembaga keuangan hanya akan memberikan pinjaman modal atau pembiayaan suatu proyek kepada pengusaha yang mempunyai *credit worthiness* atau kredibilitas yang tinggi, disamping juga harus mempertimbangkan *rate of return* atau tingkat pengembalian yang diharapkan plus bunga dari modal yang dipinjamkan untuk pembiayaan proyek tersebut. Hal ini dilakukan oleh lembaga keuangan dan bank karena semakin tinggi *credit worthiness* atau kredibilitas pengusaha, semakin tinggi

⁹ Asumsinya adalah bila MEC turun, maka jumlah investasi akan naik.

¹⁰ Untuk melihat analisis ini secara diagram, lihat bab 1, dan untuk melihat analisis ini secara numeric (angka-angka), lihat bab 2 dari buku ini.

pula kemungkinan bank dan lembaga keuangan untuk mendapatkan kembali modal tersebut plus bunga, tanpa harus mempertimbangan seberapa tinggi *rate of return* atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari proyek tersebut. Bank tidak akan mendapatkan bagian keuntungan dari proyek tersebut, berapapun tingginya keuntungan yang didapat, sebaliknya bank hanya akan mendapatkan modal pokok yang dipinjamkan dan bunga yang telah ditentukan sebelumnya.

Di sisi lain, bank dan lembaga keuangan bebas bunga yang beroperasi berdasarkan bagi hasil akan memilih suatu proyek yang mempunyai *expected rate of return* yang paling tinggi atau tingkat pengembalian yang diharapkan yang paling tinggi, dan tentu saja juga mempertimbangkan kredibilitas dan *credit worthiness* dari pengusaha, sebab bagi hasil (keuntungan) yang akan diterima oleh bank dan lembaga keuangan bebas bunga tersebut berkaitan langsung dengan produktivitas dan jumlah keuntungan yang diperoleh dari proyek-proyek itu. Karena itu, persediaan sumber daya ekonomi yang ada hanya dialokasikan untuk kegiatan investasi dan proyek-proyek yang lebih produktif yang berarti bahwa alokasi sumber daya ekonomi tersebut juga lebih efisien. Perilaku ini tentu saja mempunyai dampak yang baik terhadap pembangunan ekonomi.¹¹

Penghapusan bunga yang merupakan suatu kebijakan dalam ekonomi moneter sungguh mempunyai dampak yang baik di dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang merupakan komponen signifikan di dalam pembangunan ekonomi,¹² sebab pertumbuhan ekonomi mungkin hanya akan menambah sedikit kesejahteraan kepada manusia, bila *income* dan kekayaan yang diperoleh itu hanya dapat dinikmati dan menumpuk kepada beberapa orang tertentu saja dari masyarakat. Pemerataan dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil ini hanya dapat berjalan efektif di dalam system perekonomian bebas bunga, di mana *rate of return* dari investasi yang dilakukan dibagikan kepada mereka yang terlibat di dalam kegiatan usaha tersebut. Tingkat pengembalian keuntungan atau *expected rate of return* yang diterima oleh bank dan pengusaha bisa saja berbeda dari jumlah sebenarnya yang diterima, sebab *expected rate of return* adalah perkiraan kalkulasi di atas kertas berdasarkan

¹¹ Untuk lebih detilnya, lihat bab 2 dari buku ini.

¹² Untuk lebih detilnya, lihat karya penulis yang paling baru "Economic Development in Islam". Dalam *Journal of Islamic Economics*, Aug.-Sep. 1987, 35-45.

raso bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam mekanisme distribusi yang sedemikian seorang pengusaha tidak dapat menjadi kaya dan semakin kaya, bila dalam usahanya ia mendapatkan keuntungan yang besar dan semakin besar. Hal dimungkinkan terjadi di dalam system perekonomian yang berdasarkan bunga, di mana seorang pengusaha hanya diwajibkan membayar biaya tetap dari kegiatan investasi yang dilakukan berupa bunga, terlepas dari berapa besar ia memperoleh keuntungan dari usahanya tersebut serta mengambil semua keuntungannya setelah membayar jumlah bunga yang telah ditetapkan kepada bank yang bersangkutan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan lebih merata dan adil di dalam sistem perekonomian bebas bunga dan berdasarkan bagi hasil dari pada di dalam sistem perekonomian berdasarkan bunga.

Dampak pembangunan yang sedemikian itu merupakan sesuatu yang *built in* di dalam kebijakan moneter yang menghapus peran bunga sebagai instrumen kebijakan moneter dan sebagai harga dari modal. Pengaruh itu dapat bekerja secara efektif, meskipun tidak ada tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk suatu kebijakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan moneter kategori kedua yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah memainkan peran instrumen moneter. Menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah tujuan utama dari kebijakan moneter, dan ini dapat dilakukan dengan memainkan instrumen-instrumen kebijakan moneter. Jika bank Negara menginginkan ekspansi moneter, maka bank Negara harus mewajibkan bank komersial untuk membayar prosentase keuntungan lebih tinggi kepada pengusaha dengan mengubah rasio keuntungan (*profit ratio*) lebih banyak kepada pengusaha. Kebijakan ini akan meningkatkan investasi dari pendayagunaan sumber daya keuangan bank. Selain itu bank Negara juga dapat menaikkan jumlah pemberian kredit atau melakukan ekspansi moneter dengan menurunkan cadangan wajib (*reserve requirement*), rasio pinjaman (*lending ratio*), rasio simpanan rekening giro (*demand deposit ratio*) dan menaikkan rasio pembiayaan kembali (*refinance ratio*). Sebagai akibat dari kebijakan moneter di atas, bank akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang dimiliki dengan mem-

berikan kelonggaran-kelonggaran kredit kepada nasabah dan pengusaha untuk kegiatan investasi. Kebijakan moneter tersebut di atas diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi.

Adapun instrument kebijakan moneter lainnya seperti pemberian rangsum atau pendistribusian kredit (*credit rationing*), dan anjuran moral (*moral suasion*) dapat digunakan untuk mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi sektoral dan regional. Dengan kata lain, pemerintah dapat meminta dan menganjurkan bank komersial melalui pendekatan moral yang persuasive untuk menyalurkan kredit dalam prosentase tertentu kepada sektor-sektor yang kurang beruntung, industri-industri yang masuk dalam daftar kurang beruntung dan perlu ditolong, daerah tertentu dan beberapa organisasi masyarakat yang memerlukan pertolongan secara ekonomi dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang seimbang (tidak ada ketimpangan ekonomi), mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata di semua sektor atau lintas sektor, di semua daerah dan lintas daerah, di semua industri dan lintas industri dan beberapa kelompok atau organisasi massa yang memerlukan pertolongan dalam meningkatkan kesejahteraan di dalam ekonomi.

Kebijakan moneter melawan arus atau siklus ekonomi diharapkan tidak mempunyai dampak yang merugikan dengan dihapuskannya bunga di dalam ekonomi Islam. Selain itu, untuk mengendalikan fluktuasi siklus ekonomi, otoritas moneter memainkan instrumen-instrumen kebijakan moneter, yaitu mengubah suplai uang primer, mengubah tingkat dasar kredit yang dikucurkan oleh bank komersial atau *credit base*, mengubah rasio keuntungan, rasio pembiayaan kembali, dan rasio pinjaman, operasi pasar terbuka dan anjuran moral sesuai dengan arah kebijakan moneter yang diinginkan oleh otoritas moneter.

Di dalam usahanya untuk memperoleh dana guna membiayai kegiatan industri, baik pendirian industri maupun ekspansi industri, dan dalam rangka memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Negara-negara berkembang biasanya menciptakan institusi keuangan yang baru yang dikenal dengan bank pembangunan yang memang berfungsi sebagai penyedia dan pembiayaan untuk pendirian industri dan ekspansi industri. Dalam hal ini semua bank Islam adalah bank pembangunan yang menyalurkan dana dalam

bentuk pembiayaan berdasarkan ekuitas atau *equity based finance*, Karena itu penyaluran kredit yang dilakukannya biasanya melibatkan kegiatan kewirausahaan atau *entrepreneurial*, kegiatan manajerial dan kegiatan promosi. Dengan demikian bank Islam juga dapat memainkan peran penting di dalam proses industrialisasi dan mengikuti arah kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter dengan menghapus instrumen bunga dalam system keuangan.

Satu hal lagi yang sangat penting untuk dapat dikendalikan dan sangat direkomendasi oleh para ahli ekonomi Islam adalah menjaga stabilitas nilai mata uang dengan menggunakan semua instrumen kebijakan moneter yang ada semaksimal mungkin dan efektif. Sebab penurunan nilai mata uang merupakan suatu ketidak-adilan bagi orang yang meminjamkan uangnya berdasarkan prinsip *al-Qard al-hasan*, dan inflasi akan menyebabkan mereka menderita. Karena itu, pemerintah dan otoritas moneter sebagai agen pemerintah harus sedapat mungkin berusaha menjaga stabilitas nilai mata uang.¹³

Sebagian ahli ekonomi Islam termasuk penulis berpendapat bahwa menjaga dengan ketat stabilitas nilai mata uang tanpa membolehkan adanya inflasi yang sangat ringan, merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, sebab inflasi ringan dapat memfasilitasi tujuan pembangunan ekonomi dan kenaikan harga-harga tersebut diperbolehkan di dalam ekonomi Islam. Pengalaman sejarah di dalam dunia ekonomi mengatakan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi hampir selalu diikuti oleh kenaikan harga-harga yang lebih tinggi dari harga-harga sebelumnya. Kenaikan harga yang ringan atau yang dapat ditoleransi tidak bertentangan dengan norma-norma ekonomi Islam. Jika kenaikan harga-harga itu berlawanan dengan nilai-nilai Islam dan jika hal itu membuat ketidak-adilan, maka Nabi (*saw*) sudah pasti tidak mengizinkan harga-harga tersebut untuk naik¹⁴ tanpa adanya kontrol oleh pemerintah di dalam situasi, di mana praktek pemberian pinjaman *al-Qard al-Hasan* terjadi di masyarakat, begitu juga tidak ada indeksasi yang dilakukan untuk membuat inflasi tersebut berhenti atau mengatasi apa yang

¹³ M. Umer Chapra, "Money and Banking in an Islamic Economics". Dalam Muhammad Ariff (ed.), *Monetary and Fiscal Economic of Islam*. Jeddah Center for Research in Islamic Economics. 1982 p. 145-176

¹⁴ Nabi (*saw*), pernah sua ketika diminta untuk menetapkan harga-harga di pasar pada waktu terjadi inflasi, namun Nabi (SAW) menolak untuk melakukannya. (Sunan al-Trimizi, Kitab al-Buyu').

dinamakan ketidak-adilan inflasi.

Barangsiapa memberikan pinjaman uang berdasarkan prinsip *al-Qard al-Hasan* berarti ia memberikan pinjaman kepada Allah (*swt*), dan akan memperoleh balasan (pembayaran) yang berlipat dari Allah.¹⁵ Ini merupakan suatu balasan yang cukup untuk suatu pemberian kompensasi terhadap penundaan waktu (dalam menggunakan uang yang telah dipinjamkan) dan terhadap potensi kehilangan nilai mata uang (disebabkan oleh inflasi), bila memang terjadi inflasi. Kehilangan nilai mata uang dalam hal ini bukan berarti telah terjadi ketidak-adilan, tetapi lebih disebabkan oleh fenomena alamiah dari perilaku altruistik (mendahulukan kepentingan orang lain demi suatu *maslahah*) dalam memberikan pinjaman uang dan melakukan pengorbanan untuk mencari *rida* Allah (*swt*).

Fenomena *al-Qard al-Hasan* yang terjadi dan berlaku di antara individu-individu di masyarakat sedikit berbeda dengan apa yang berlaku di lembaga keuangan dan dunia perbankan. Lembaga keuangan dan perbankan merupakan lembaga intermediasi antara para nasabah yang mendepositokan uang dan yang meminjam uang, dan ini perlu suatu kebijakan (*policy*) yang hati-hati dalam menerapkan rasio pinjaman yang berbentuk *al-Qard al-Hasan*. Ada sedikitnya dua macam problem dalam menghadapi fenomena ini. *Pertama*, Para depositor diminta untuk memberika otoritas kepada bank dalam memberika pinjaman dalam prosentase tertentu yang berdasarkan prinsip *al-Qard al-Hasan*, dalam kasus ini aturan main dalam *al-Qard al-Hasan* yang berlaku pada individu juga berlaku sama pada bank, yaitu bahwa bank berperilaku dan berbuat sebagai agen para depositor yang menerima return dari uang yang mereka simpan di bank yang berbentuk *al-Qard al-Hasan*, karena itu mereka para depositor juga harus menanggung resiko kerugian pada nilai mata uang mereka. *Kedua*, Bank membuat ketentuan untuk menyediakan cadangan uang yang disisihkan dari keuntungan yang diperoleh, sebelum menyatakan pembagian dividen agar dapat memberikan konpensasi kerugian yang dialami kepada para depositor.

Pendek kata, inflasi ringan dan terkendali diperbolehkan di dalam ekonomi Islam dan tidak menyebabkan ketidak-adilan ekonomi di masyarakat, bahkan inflasi ringan dapat memfasilitasi pembangunan ekonomi.

¹⁵ Al-Qur'an, 2:245; 57:11

Penutup

Sebagai penutup penulis ingin menegaskan bahwa kebijakan moneter saja tidaklah cukup bagi pemerintah untuk melakukan arah ekonomi yang dikehendaki, tetapi pemerintah harus menggunakan kedua alat kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan moneter di dalam usaha untuk mencapai peningkatan produksi barang dan jasa yang tinggi dan stabil dalam jangka panjang. Melimpahnya barang dan jasa dalam jangka panjang akibat dari peningkatan produksi merupakan hal yang akan membawa kepada kemakmuran ekonomi masyarakat. Karena itu kedua kebijakan fiskal dan moneter tersebut harus saling melengkapi, guna dapat mencapai tujuan utama dari kedua kebijakan tersebut yaitu tercapainya produksi barang dan jasa yang tinggi dan stabil dalam jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan output. []

Daftar Pustaka

- Boediono, Ekonomi Makro, Seri Sinopsis. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999)
- Chapra. M. Umer, *"Toward a Just Monetary System"*. (Leicester: The Islamic Foundation, 1985)
- _____, *"Money and Banking in an Islamic Economics"*. Dalam Muhammad Ariff (ed.), *Monetary and Fiscal Economic of Islam*. (Jeddah Center for Research in Islamic Economics. 1982)
- Jhingan, M.L. *The Economics of Development and planning*. Ter. D. Guritno, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000)
- Mansur, Ahmad. *Potensi Tabungan, Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Dalam Jurnal Keislaman Program Pasca Sarjana "AKADEMIKA" IAIN Sunan Ampel Surabaya. Vol. 13, No. 1, September, 2003
- Roger L. Miller dan David D. VanHoose, *Modern Money and Banking*. (Singapore: McGraw-Hill. Inc., 1985)
- Sadeq, A.H.M. *Economic Development in Islam*. (Petaling Jaya: Pelanduk Publication, 1988)
- Siddiqui, M. N, *"Banking Without Interest"*. (Leicester: The Islamic Foundation, 1983)
- Uzair. M, *"Central Banking Operations in Interest-Free Banking System"*, dalam Mohammad Ariff (ed). *Monetary and Fiscal Economics of Islam"*. (Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics, 1982)